

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Segala sesuatu yang menyangkut perekonomian akan selalu berhubungan dengan dunia perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Islam. Hampir semua aktivitas pembiayaan dan pendanaan selalu melibatkan perbankan dalam melancarkan usaha yang dijalani. Dimana salah satu tugas perbankan sebagai penyedia modal adalah memberi pinjaman yang didalamnya terdapat banyak pilihan untuk memenuhi keperluan usaha masyarakat (Bintang, 2013).

Sampai saat ini masalah ekonomi yang utama adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Pada tahun 1992, pertama kalinya Bank Syariah beroperasi dengan nama Bank Muamalat yang telah berdiri sejak tahun 1991. Namun pada saat itu peraturan pemerintah mengenai perbankan Syariah masih kurang jelas. Yaitu pada UU.No 7 Tahun 1992 tentang perbankan diakomodasikan sistem perbankan bagi hasil. Sehingga UU tersebut dianggap masih kurang tegas. Maka dari itu, diterbitkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, secara tegas disebutkan bahwa sistem perbankan syariah telah termasuk kedalam bagian sistem perbankan nasional.

Beroperasinya Bank Muamalat kemudian diikuti oleh berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mulai beroperasi pada tanggal 19

Agustus 1991 dengan konsep dasar operasional bank yang sama yaitu: simpanan murni (*al wadiah*), sistem bagi hasil, sistem jual beli dan margin keuntungan, sistem sewa dan sistem upah (*fee*).

Saat ini perbankan syariah telah banyak membantu dalam pengembangan sentra-sentra ekonomi di Indonesia dengan berbagai pelayanan jasa yang disediakan untuk semua lapisan masyarakat. Menurut Muhamad (2014), penyaluran dana atau pembiayaan dana yang disediakan dalam beberapa bentuk yang dapat dipilih yaitu:

1. Bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*).
2. Sewa menyewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiyabittamlik*).
3. Jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah, salam* dan *istishna*).
4. Pinjam meminjam (*qardh*).
5. Sewa menyewa jasa untuk transaksi multijasa.

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai lembaga intermediasi dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana pihak ketiga yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan suntikan dana dalam memenuhi kebutuhan usaha mereka.

Pembiayaan merupakan salah satu elemen penting bagi perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan yang tepat akan mempengaruhi stabilitas dari lembaga keuangan itu sendiri. Kondisi lembaga keuangan dengan pembiayaan yang stabil juga

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan termasuk perbankan syariah harus mampu mempertahankan kestabilan pembiayaan. BPRS merupakan lembaga keuangan berskala mikro yang difokuskan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk usaha-usaha dengan skala kecil atau UMKM yang membutuhkan modal dalam meningkatkan produksi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bank syariah, Bank Indonesia memfasilitasi berdirinya tiga jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ketersediaan pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya BPRS juga dipengaruhi akses perbankan yang mudah. Jumlah BPRS di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu antara tahun 2010-2016 (Tabel 1.1.)

**TABEL 1.1.**  
Jaringan Kantor BPRS di Indonesia 2010-Juli 2016

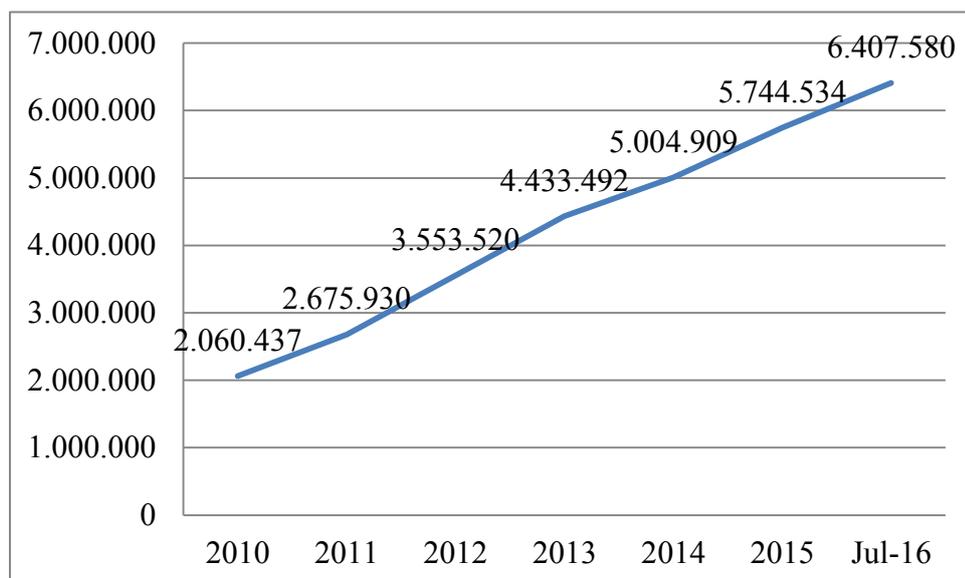
Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jul-16
<b>BPRS</b>							
jumlah bank	150	155	158	163	163	163	165
jumlah kantor	286	364	401	402	439	446	435
<b>TOTAL</b>	<b>436</b>	<b>519</b>	<b>559</b>	<b>565</b>	<b>602</b>	<b>609</b>	<b>600</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 dan Juli 2016

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa BPRS mengalami peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik dalam bentuk bank dan kantor. Peningkatan jumlah bank terlihat signifikan dari tahun 2010 (155 bank) sampai tahun 2013 (163 bank) atau bertambah 25 bank dan bertahan hingga tahun 2015 lalu kemudian

meningkat pada bulan Juli 2016 yang mencapai 435 bank. Di sisi jumlah kantor, BPRS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2010 (286 kantor) yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan telah menyentuh angka 446 kantor pada 2015. Namun pada Juli 2016 jumlah kantor BPRS mengalami penurunan (435 kantor) atau menurun 11 kantor.

Berikut adalah gambar pembiayaan yang telah dikeluarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2016.



Sumber: statistik perbankan syariah Desember 2014 dan Juli 2016

### **GAMBAR 1.1.**

Komposisi pembiayaan – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2010-  
Juli 2016

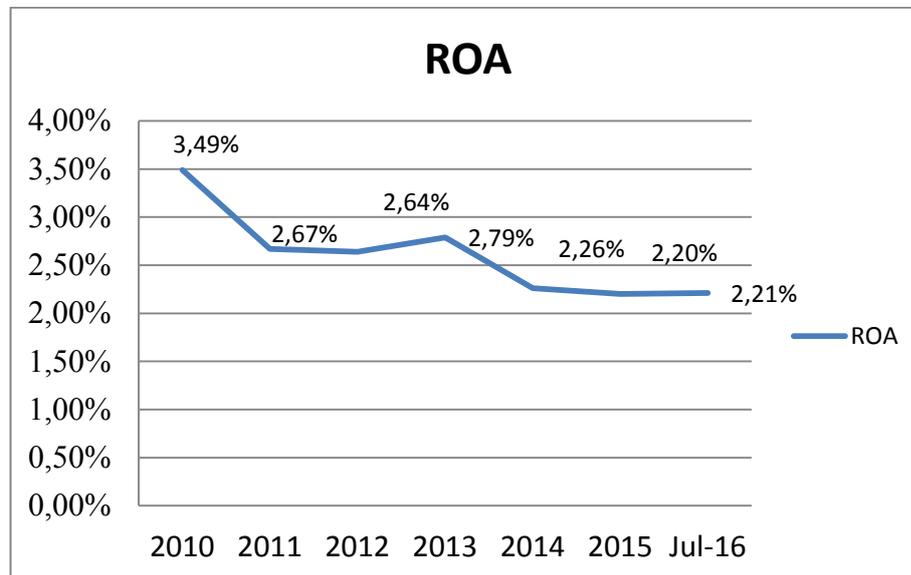
Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang dikeluarkan BPRS dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2016 terus mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pembiayaan BPRS pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.060.437.000.000,- yang meningkat sampai dengan

bulan Juli 2016 (Rp. 6.407.580.000.000,-) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.347.143.000.000,- peningkatan pembiayaan pembiayaan BPRS yang paling tinggi adalah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebanyak Rp. 879.972.000.000,- pembiayaan BPRS pada gambar 1.1 diatas adalah pembiayaan yang mencakup semua jenis pembiayaan yang diberikan BPRS yaitu antara lain *akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, akad ijarah, akad qardh, akad istishna* dan juga multijasa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu disebutkan bahwa pembiayaan perbankan syariah diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Salah satunya adalah ROA. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agista (2015) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati (2016), menyatakan bahwa semakin besarnya tingkat profitabilitas (ROA) yang dimiliki oleh bank syariah akan mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Karena dengan besarnya profitabilitas, maka bank akan lebih banyak menginvestasikan keuntungan untuk kegiatan juga menguntungkan seperti penyaluran pembiayaan.

*Return Of Assets (ROA)* atau yang di Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah rentabilitas ekonomi yang menjadi salah satu faktor internal, digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja bank dengan membandingkan

dua variabel yaitu pendapatan bersih (*Net Income*) dan rata-rata aktiva (*Average Assets*) (Arifin, 2006)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 dan Juli 2016

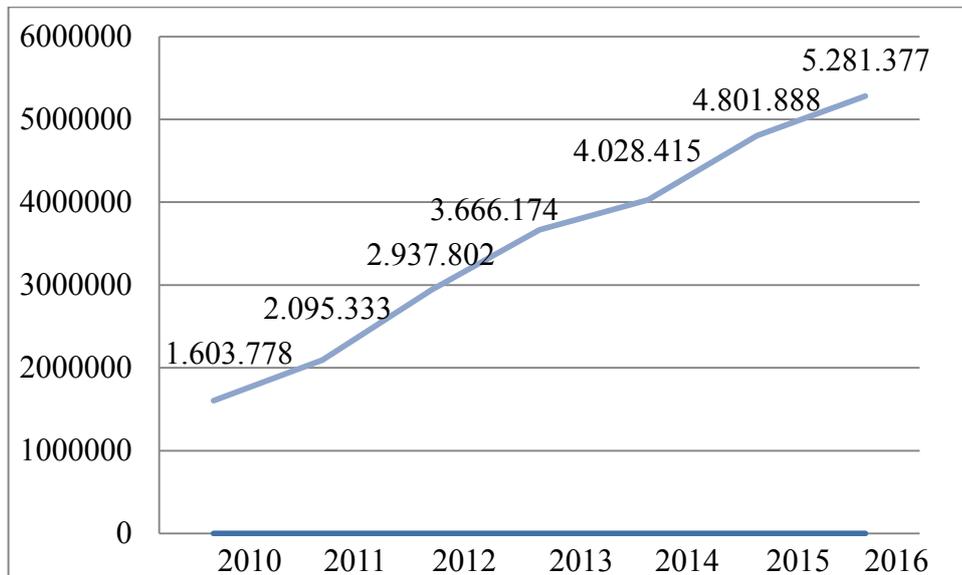
### GAMBAR 1.2

Rasio keuangan (ROA) BPRS di Indonesia pada tahun 2010 – Juli 2016

Dari gambar 1.2 diatas, tingkat ROA pada bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2016 menurun. Pada tahun 2010 tingkat ROA sebesar 3,49% turun hingga 2,64% pada tahun 2012 dan meningkat kembali pada tahun 2013 (2,79%) atau meningkat sebesar 14%. Namun kembali menurun pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,26% dan terus menurun hingga tahun 2015 yaitu sebesar 2,20% dan pada bulan Juli 2016 meningkat sebanyak 1%.

Sementara itu, dari penelitian Arianti (2011) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah dana pihak ketiga (DPK). Menurut UU no.10 tahun 1998 mengenai perbankan disebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 dan Juli 2016

### GAMBAR 1.3.

Komposisi DPK – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2010-Juli 2016

Dari gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh BPRS dari tahun 2010 sebanyak Rp.1.603.778.000.000,- yang meningkat terus menerus sampai Juli 2016 yaitu sebanyak Rp.5.281.377.000.000,- hal ini menunjukkan prestasi yang baik bagi perbankan syariah karena DPK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi perbankan syariah. Dimana apabila semakin tinggi dana yang terhimpun dalam dana pihak ketiga (DPK) maka akan semakin tinggi juga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri. Sementara itu, semakin tinggi dana yang terhimpun maka bank juga akan semakin banyak

menyalurkan pembiayaan yang akan meningkatkan keuntungan (*profit*) bank syariah (Saputra, 2014).

Tidak hanya faktor internal yang berupa *Return of Assets (ROA)* dan dana pihak ketiga (DPK), terdapat juga faktor eksternal yang diduga mempengaruhi pembiayaan BPRS. Dalam penelitian ini diproksikan pada tingkat inflasi di Indonesia. Secara teoritis inflasi akan mempengaruhi semua pelaku ekonomi di sektor riil maupun sektor moneter, termasuk pada BPRS yang juga merasakan dampak inflasi. Inflasi adalah proses yang terjadi dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya harga-harga barang secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh khamdi (2015) inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. BPRS sebagai lembaga keuangan memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap kondisi makro ekonomi yang terjadi. Sehingga gejala-gejala yang terjadi dalam makroekonomi akan menimbulkan efek terhadap BPRS.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan juudul “ANALISIS PENGARUH *RETURN OF ASSET (ROA)*, DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Return Of Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia?
3. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Return Of Assets* (ROA) terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi (dalam penelitian ini, Tingkat inflasi) terhadap pembiayaan di BPRS Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

#### 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan juga untuk menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima di bangku kuliah dan praktik di lapangan.

#### 2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan bagi bank Indonesia ataupun perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

#### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi perbankan syariah khususnya tentang Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia.

#### 4. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang perbankan syariah khususnya mengenai bank perkreditan rakyat syariah. Selanjutnya dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul yang sejenis atau membahas variabel sejenis yang ada pada penelitian ini.